

## WEEKLY REPORT

### MARKET DRIVERS

#### DOMESTIK

- **Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi pada Desember 2022 sebesar 0,66% mom, meningkat dibandingkan pada November 2022 yang sebesar 0,09% mom (2 Januari 2023).** Perkembangan ini lebih disebabkan oleh faktor musiman yaitu peningkatan permintaan liburan sekolah, serta perayaan natal dan tahun baru. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65% yoy dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26% yoy dengan IHK sebesar 110,95. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, antara lain: beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan segar, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, bayam, tahu mentah, kangkung, minyak goreng, rokok kretek filter, kontrak rumah, tarif air minum PAM, tarif angkutan udara, tarif kereta api, bensin, dan emas perhiasan. Tingkat inflasi tahunan dibandingkan Desember 2022 yaitu sebesar 5,51% yoy.
- **Pada bulan Desember 2022 PMI Manufaktur Indonesia tercatat sebesar 50,9 atau menguat dari 50,3 pada bulan sebelumnya (2 Januari 2023).** Sektor industri manufaktur di tanah air konsisten berada dalam level ekspansif selama 16 bulan berturut-turut sejak September 2021. Hasil ini menunjukkan geliat industri manufaktur nasional terus mengalami perbaikan serta semakin pulih setelah terkena dampak pandemi Covid-19 dan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu karena ancaman resesi. PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2022 mampu melampaui PMI Manufaktur Jerman (47,4), Jepang (48,8), Australia (50,4), Myanmar (42,1), Belanda (48,6), Prancis (47,4), Korea Selatan (48,2), Inggris (44,7), Amerika Serikat (46,2), dan Zona Eropa (47,8). produksi manufaktur Indonesia mengalami ekspansi pada kisaran lebih cepat pada bulan Desember. Hal ini didorong oleh kenaikan permintaan atas barang-barang produksi Indonesia. Kondisi permintaan ini menyebabkan kenaikan pesanan baru pada bulan Desember. Kinerja industri manufaktur kita akan semakin tumbuh di tahun 2023 ini, seiring dengan berbagai kebijakan strategis yang sedang disiapkan oleh pemerintah.
- **Penyaluran kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16% yoy, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15% yoy, sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% yoy dan 9,10% yoy (2 Januari 2023).** Adapun, secara bulanan, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp13,96 triliun menjadi Rp6.347,5 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% yoy menjadi Rp7.974 triliun, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit(AL/NCD) dan sebesar 134,97 jauh di atas threshold yang sebesar 50% dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) sebesar 30,42%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 10%. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL perbankan sebesar 2,65%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar Rp13,27 triliun menjadi Rp499,87 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah. Posisi Devisa Neto (PDN) November 2022 tercatat sebesar 2,05%, jauh di bawah *threshold* 20%. Sedangkan rasio permodalan (CAR) industri Perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08%.
- **Pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun (4 Januari 2023).** Realisasi ini tumbuh 30,6% yoy sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar

#### Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3% target, dan tumbuh 18% yoy. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara juga melampaui target dimana realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan Rp588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3% dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp458,5 triliun.

- **Belanja negara tahun 2022 tumbuh positif dan terus dioptimalkan, mencatatkan realisasi Rp3.090,8 triliun atau 99,5% dari target berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022, atau tumbuh 10,9% dibandingkan realisasi tahun 2021 (4 Januari 2023).** Realisasi belanja ini terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.274,5 triliun atau 98,8% dari Perpres 98/2022, serta tumbuh 13,7% dari realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.079,3 triliun atau 114,1% dari Perpres 98/2022, dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,2% dari Perpres 98/2022 meningkat 47,6% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun atau 95,2% dari Perpres 98/2022 dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun atau 109,7% dari Perpres 98/2022. Angka ini meningkat 192,7% dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat. Sementara itu, realisasi TKD tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun atau 101,4% dari Perpres 98/2022, tumbuh 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2021. Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa.

- **Realisasi anggaran PC-PEN hingga 30 Desember 2022 mencapai Rp 396,7 triliun atau 87,1% dari pagu anggaran (4 Januari 2023).** Anggaran tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak nyata untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Anggaran PC-PEN terbagi dalam tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp61,3 triliun yang digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti klaim pembayaran pasien Covid-19 tahun 2021 dan 2022 yang sebesar Rp28,8 triliun. Realisasi anggaran tersebut untuk membayar tunggakan klaim pasien tahun 2021 untuk 343 ribu pasien dan tahun 2022 untuk 475 pasien. Selanjutnya untuk biaya vaksinasi sebesar Rp3,4 triliun bagi 60,1 juta dosis. Untuk kegiatan penelitian menghabiskan anggaran Rp 207,7 miliar. Anggaran klaster kesehatan juga digunakan untuk insentif/santunan tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp3,5 triliun, membayar tunggakan insentif 2021 untuk 46.826 nakes pusat, tahun 2022 untuk 533.421 nakes pusat, dan pembayaran santunan kematian bagi 81 nakes pusat. Selain itu, untuk pembayaran insentif perpajakan kesehatan Rp1,8 triliun, fasilitas impor vaksin Rp1,1 triliun, fasilitas impor alat kesehatan Rp300 miliar, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk alat kesehatan sebesar Rp400 miliar, serta dukungan APBD penanganan Covid-19 di desa dan daerah sebesar Rp18,3 triliun. Realisasi klaster perlindungan masyarakat Rp152 triliun yang meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,7 triliun untuk 20,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM); Program keluarga harapan (PKH) Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM; PKLW Nelayan Rp1,3 triliun untuk 2,1 juta orang, BLT Dana Desa Rp26,9 triliun untuk 7,5 juta KPM. Bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp244,7 miliar

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

**Investor Relations & Research Division**  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

#### Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

untuk 400 ribu orang, serta prakerja Rp16,4 triliun untuk 5 juta orang; serta kartu sembako Rp44,1 triliun untuk 18,8 juta KPM. Realisasi kluster pemulihan ekonomi mencapai Rp183,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk program padat karya sebesar Rp21,3 triliun, dengan target penyerapan tenaga kerja 540 ribu tenaga kerja tersebar di 34 provinsi. Pemerintah membelanjakan Rp36,1 triliun untuk ketahanan pangan yang terbagi dalam kementerian/lembaga sebesar Rp28,9 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp7,2 triliun. Anggaran untuk dukungan UMKM mencapai Rp26,1 triliun yang didistribusikan untuk KUR Rp364,3 triliun bagi 7,6 juta debitur. Nilai penjaminan UMKM Rp12,7 triliun untuk 764 ribu debitur; nilai penjaminan korporasi Rp2,2 triliun untuk 8 debitur; insentif usaha/Pajak: Rp 19,7 triliun; insentif diberikan bagi industri terdampak, penurunan tarif pajak penghasilan badan, pembebasan pajak penghasilan impor, PPnBM DTP kendaraan bermotor, serta PPN DTP Perumahan.

- **Menteri Keuangan menyampaikan defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3% yakni 2,38%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57% (4 Januari 2023).** Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien. Keseimbangan primer sebagaimana APBN awal direncanakan Rp462,2 triliun, kemudian diubah menjadi Rp434,4 triliun sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Namun nyatanya, realisasinya hanya Rp78 triliun. Defisit APBN 2022 ditutup dengan Rp464,3 triliun atau jika dipresentasikan dengan PDB hanya 2,38%. Angka ini jika dibandingkan APBN awal dan Perpres 98/2022 jauh lebih rendah yaitu Rp868 triliun di APBN awal dan Rp840,2 triliun di Perpres 98/2022. Selain itu, Menkeu juga menyatakan sisi pembiayaan juga berhasil mencatatkan capaian positif. Awal tahun APBN 2022 di desain pembiayaan anggaran mencapai Rp868 triliun dan berhasil diturunkan hingga Rp583 triliun, jauh lebih rendah dari realisasi tahun 2021 Rp871,7 triliun.

- **Posisi cadangan devisa Indonesia pada Desember 2022 mencapai USD137,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada November 2022 sebesar USD134,0 miliar (6 Januari 2023).** Peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

#### MARKET IMPACTS

- **Dari Indikator Pasar Keuangan Indonesia di Tabel 4, dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan kondisi dalam satu minggu terakhir:**
  - **IHSG melemah sebesar 2,42% dalam seminggu terakhir** yaitu dari 6.851 ke 6.685. Jika dibandingkan akhir tahun 2022 masih melemah sebesar 2,42% ytd. Prospek perekonomian nasional tahun 2023 turut mempengaruhi kinerja pasar saham pada minggu ini.
  - Dalam satu minggu terakhir, **Rupiah terdepresiasi sebesar 0,39%** dari Rp15.573 ke Rp15.633 per USD. Jika dibandingkan akhir tahun 2022 masih terdepresiasi sebesar 0,39% ytd. Depresiasi rupiah selama satu minggu ini disebabkan antara lain yield SBN 10 tahun naik ke level 6,97%, premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke level 97,03 serta investor asing mencatat *net inflow* sebesar Rp8,05 triliun.
  - **Yield SBN Rupiah 10 tahun naik 5 bps ke level 6,97% dalam seminggu terakhir. Posisi ini menjadi 5 bps lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2022 yang sebesar 6,92%.** Sementara yield SBN USD 10 tahun naik 23 bps ke posisi 5,03% dalam seminggu terakhir, dan jika dibandingkan akhir tahun 2022 posisinya lebih tinggi 23 bps.

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

#### Disclaimer

Data diambil dari sumber terpercaya.  
Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

**Tabel 1. Realisasi Sementara APBN 2022**

Uraian	APBN 2022	Perpres 98/2022	Realisasi APBN 2022	% terhadap Perpres 98/2022
<b>A Pendapatan Negara</b>	<b>1846.1</b>	<b>2266.2</b>	<b>2626.4</b>	<b>115.9%</b>
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	1510.0	1784.0	2034.5	114.0%
1. Penerimaan Pajak	1265.0	1485.0	1716.8	115.6%
2. Kepabeanan & Cukai	245.0	299.0	317.8	106.3%
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	335.6	481.6	588.3	122.2%
<b>B Belanja Negara</b>	<b>2714.2</b>	<b>3106.4</b>	<b>3090.8</b>	<b>99.5%</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	1944.5	2301.6	2274.5	98.8%
<b>II. Transfer ke daerah dan Dana Desa</b>	769.6	804.8	816.2	101.4%
<b>C Keseimbangan Primer</b>	<b>(462.2)</b>	<b>(434.4)</b>	<b>(78.0)</b>	<b>18.0%</b>
<b>D Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)</b>	<b>(868.0)</b>	<b>(840.2)</b>	<b>(464.3)</b>	<b>55.3%</b>
% Surplus / (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(4.85)	(4.50)	(2.38)	
<b>E Pembiayaan Anggaran</b>	<b>868.0</b>	<b>840.2</b>	<b>583.5</b>	<b>69.4%</b>

Sumber : Kemenkeu

**Tabel 2. Realisasi Dana PEN s.d 30 Desember 2022**

Sektor	Stimulus (Rp T)	Realisasi (Rp T)	Realisasi (%)
Penanganan Kesehatan	122.54	61.30	50.0%
Perlindungan Masyarakat	154.76	152.00	98.2%
Penguatan Pemulihan Ekonomi	178.32	183.40	102.8%
<b>Total</b>	<b>455.62</b>	<b>396.70</b>	<b>87.1%</b>

Sumber : Kemenkeu

**Tabel 3. Perubahan Beberapa Indikator Pasar**

Perubahan Year-to-Date 6 Januari 2023								
Nilai Tukar		Saham		Obligasi Pemerintah 10Y			Komoditi	
				Negara	Yield	Yield Change		
DXY	1.50%	MXAPJ	3.07%	Italy	4.35%	-28	Rubber	2.4%
THB	1.44%	SHCOMP	2.21%	Germany	2.30%	-19	Nickel	1.5%
CNY	1.28%	SET	0.02%	USA	3.72%	-11	Gold	1.1%
RUB	0.44%	NKY	-0.46%	Thailand	2.55%	-9	Coal	-1.0%
PHP	0.18%	SPX	-1.07%	China	2.83%	0	Rice	-2.1%
MYR	-0.23%	FBMKLCI	-1.09%	Russia	15.99%	0	CPO	-3.2%
IDR	-0.39%	CCMP	-1.65%	India	7.36%	2	Wheat	-3.4%
EUR	-1.38%	IBOV	-1.91%	Indonesia	6.97%	5	Brent	-6.1%
BRL	-1.40%	SENSEX	-2.29%	Japan	0.50%	9	WTI	-6.4%
JPY	-2.03%	JCI	-2.42%	Brazil	13.10%	41	Natural Gas	-13.2%

Sumber : Bloomberg

**Tabel 4. Indikator Pasar Keuangan Indonesia Dalam Seminggu Terakhir**

	6-Jan-23	30-Dec-22	Dec 22	6 Jan - 30 Des (wow)	Dec 22 - 6 Jan (ytd)
IHSG	6 685	6 851	6 851	-2.42%	-2.42%
Rupiah	15 633	15 573	15 573	-0.39%	-0.39%
10Y Rupiah Bond Yield	6.97	6.92	6.92	5 bps	5 bps
10Y USD Bond Yield	5.03	4.80	4.80	23 bps	23 bps
CDS Indo 5Y	97.03	99.57	99.57	-2 bps	-2 bps

Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**

Chief Economist

**Widya Pratomo**

Junior Economist

**Investor Relations & Research Division**

PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16

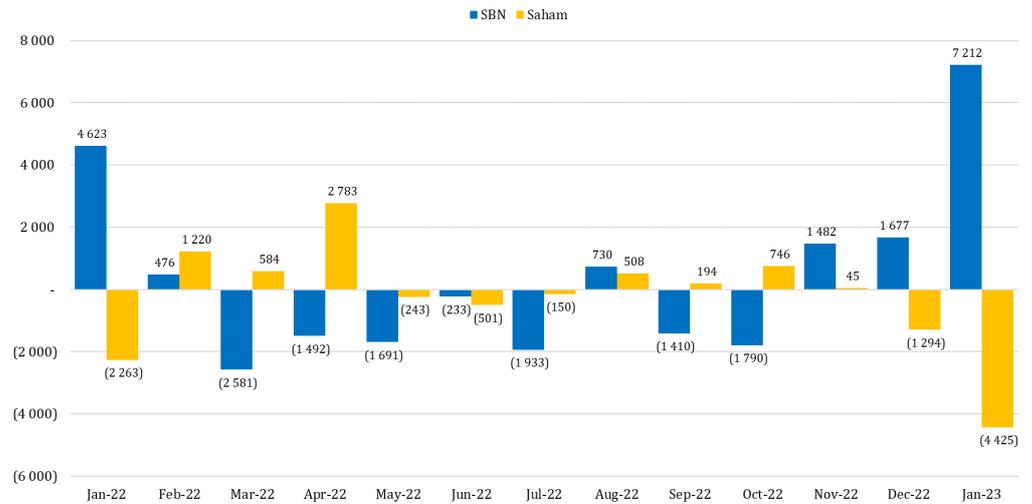
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atauafiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

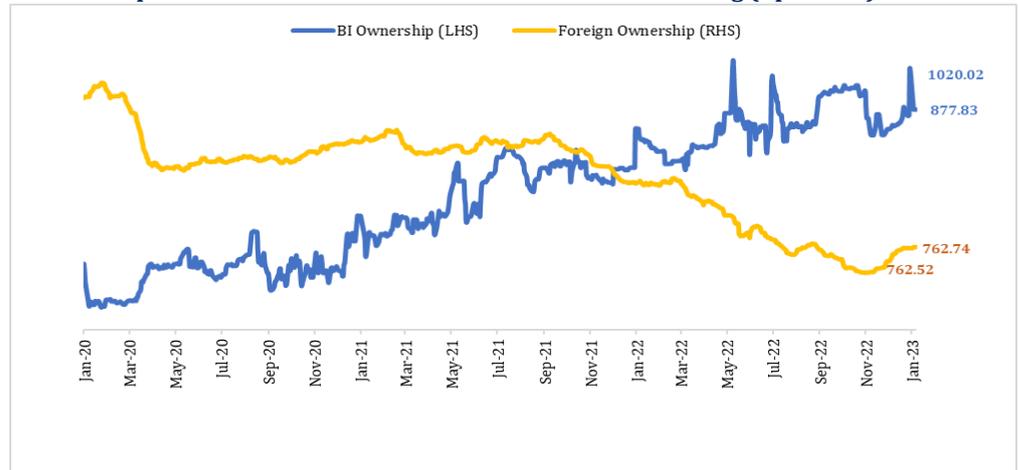


**Grafik 4. Net Buy/Sell Investor Asing di SBN dan Saham (USD juta) s.d 6 Januari 2023**



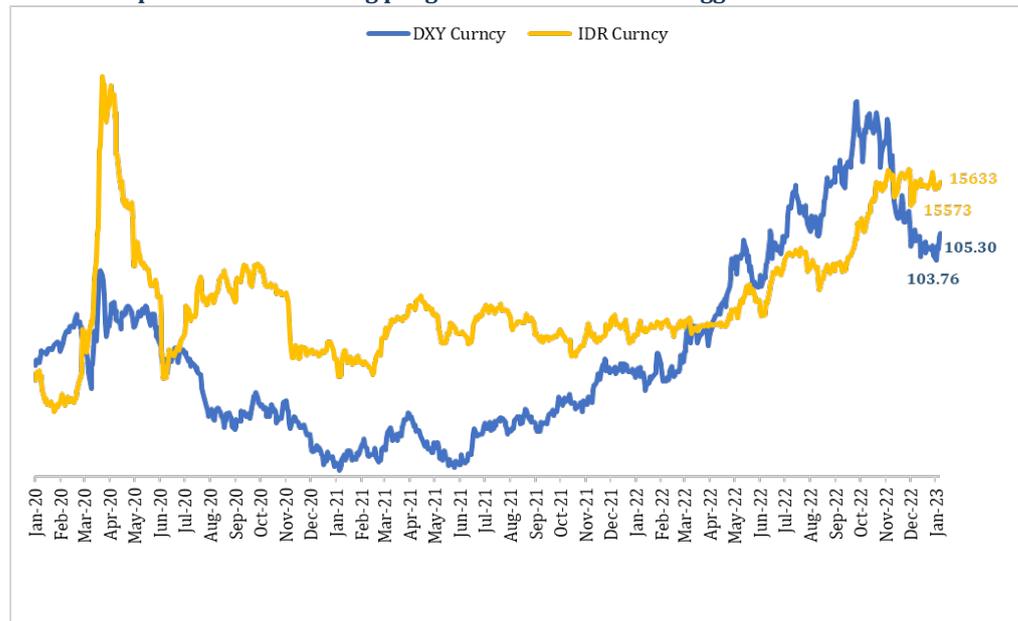
Sumber : Bloomberg

**Grafik 5. Kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan Investor Asing (Rp triliun)**



Sumber : Bloomberg

**Grafik 6. Rupiah melemah seiring penguatan DXY dalam seminggu terakhir**



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

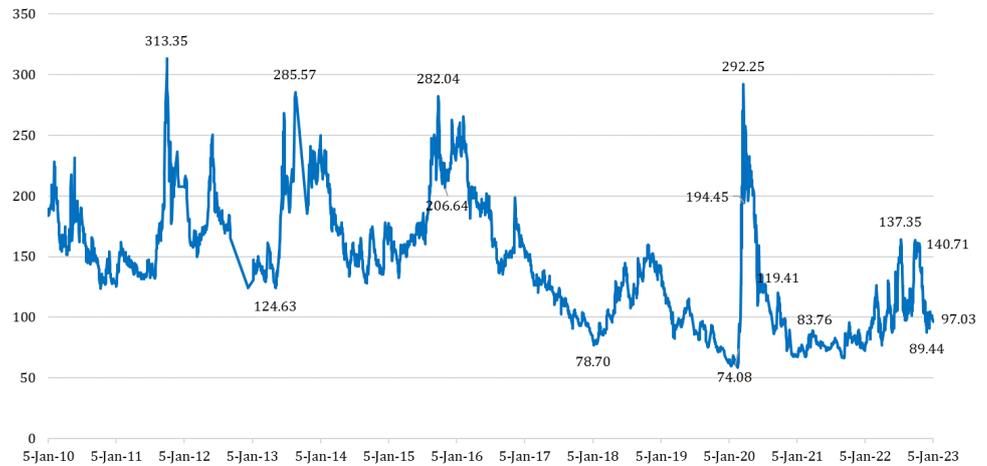
Investor Relations & Research Division  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.

**Grafik 7. Perkembangan Premi CDS Indonesia 5 Tahun**



Sumber : Bloomberg

**Winang Budoyo**  
Chief Economist

**Widya Pratomo**  
Junior Economist

**Investor Relations & Research Division**  
PT Bank Tabungan Negara  
(Persero), Tbk

Menara BTN Lt. 16  
Jl. Gajah Mada No. 1,  
Jakarta 10130

**Disclaimer**

Data diambil dari sumber terpercaya. Laporan harian disusun untuk kepentingan internal. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan/atau afiliasinya, termasuk karyawan tidak bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data dari sumber data yang digunakan. Opini dalam Analisa merupakan pendapat pribadi analis dan tidak mewakili perusahaan.